

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Literatur Review

Untuk membantu penulis dalam melakukan sebuah penelitian maka, penulis melakukan sebuah literatur review untuk melihat penelitian-penelitian yang telah dilakukan. Adapun literatur review yang di gunakan penulis diantaranya:

Jurnal yang pertama berjudul **“Paradiplomacy: Bangkitnya Aktor Lokal di Fora Internasional”**, yang di tulis oleh Takdir Ali Mukti. Jurnal ini menjelaskan bahwa Paradiplomasi sebagai kajian yang relative baru dalam ilmu hubungan internasional, mengacu pada perilaku dan kapasitas dalam melakukan hubungan luar negeri yang dilakukan oleh entitas ‘*sub-state*’, dalam rangka kepentingan mereka secara spesifik. Di dalam penelitian ini penulis jurnal ini menggunakan studi yang dilakukan oleh David Crikemans yang menunjukkan bahwa di Negara-negara maju, hubungan pusat dan daerah dalam ‘*share*’ kedaulatan di bidang hubungan internasional ini ada 2 kecenderungan, yakni ada yang bersifat kooperatif dan ada pula yang konfliktual. Fenomena ‘*paradiplomacy*’ yang pada awalnya muncul di Eropa, namun saat ini, dengan intensitas yang berbeda, telah menjadi gejala umum di tengah interaksi transnasional masyarakat dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Banyak daerah otonom atau pmda provinsi/kabupaten/kota yang secara aktif menjalin kerjasama luar negeri dengan pihak asing dalam bentuk ikatan ‘*memorandum of understanding*’ atau bentuk-bentuk Perjanjian Internasional lainnya. Penelitian ini

bertujuan untuk menyajikan beberapa studi tentang paradiplomasi di beberapa pemerintahan regional di Eropa, Canada dan Korea Selatan, sebagai perbandingan untuk melihat permasalahan ini di tanah air.

Selanjutnya jurnal ke dua yang berjudul **“Implementasi Kerjasama Sister City Studi Kasus Sister City Bandung – Braunschweig (Tahun 2000 – 2013)”**, yang di tulis oleh oleh Hendrini Renola Fitri dan Faisyal Rani. Jurnal ini menjelaskan suatu studi mengenai kerjasama *Sister City* antara kota Bandung, Indonesia dengan kota Braunschweig yang berada di Jerman serta menjelaskan implementasi dari kerjasama tersebut sesuai yang ada di dalam perjanjian kerjasama antara kedua kota tersebut. Penelitian ini ditujukan untuk membuka wawasan mengenai hubungan kemitraan kota dengan mengulas latar belakang perkembangan kerjasama *Sister City* serta berbagai manfaat yang dapat diperoleh melalui kerjasama yang konkrit dan dikelola secara baik, khususnya dalam penelitian ini diangkat mengenai kerjasama yang terjadi antara Bandung dan Braunschweig sebagai dua kota pertama dan terlama berhasil mengaplikasikan program *Sister City* Indonesia. Penulis jurnal ini menggunakan pemikiran dari Robert Keohane dan Joseph Nye yang mengatakan, ketika keadaan disaat kedua Negara yang bekerjasama, telah memiliki latarbelakang keunggulan yang sama, sehingga dalam bekerjasama, terwujud *sensitive interdependence* (ketergantungan sensitif), sehingga kedua negara tersebut tidak terlalu bergantung kepada negara pasangannya. Kolaborasi ini hanyalah bentuk kerjasama untuk meningkatkan potensi ataupun keunggulan yang dimiliki masing-masing, bukan untuk melengkapi kekurangan atau hal-hal yang tidak dimiliki suatu negara kemudian diharapkan ada pada negara lain. Interdependensi model ini akan membawa

dampak kekuatan jangka panjang, maupun jangka pendek. Hasil dari penelitian di dalam jurnal ini ialah Kesamaan karakteristik mempermudah terjalannya kerjasama yang *langgeng* dan proses perwujudan tujuan bersama, karena bidang-bidang yang dikerjasamakan memiliki komparasi sehingga mudah untuk dikerjakan bersama.

Selanjutnya untuk Jurnal Ketiga yang berjudul “**Pelaksanaan *Citizen Diplomacy* Sebagai Upaya Penguatan Identitas Bangsa Di Era ASEAN Community**”, yang di tulis oleh Setyasih Harini dan Halifa Haqqi yang merupakan Staf Pengajar Ilmu Hubungan Internasional Universitas Slamet Riyadi Surakarta. Jurnal ini menjelaskan tentang perubahan yang terjadi pada hubungan internasional di era globalisasi saat ini yang memungkinkan peran anggota masyarakat (warganegara) untuk memperluas dan memperlebar jaringan koneksi dengan sesamanya dari negara lain yang di sebut dengan istilah *citizen diplomacy* yang diyakini mampu menyumbangkan dampak positif terhadap relasi antar bangsa. Upaya yang dilakukan dalam melakukan aktivitas di oleh *citizen diplomacy* ialah pameran, korespondensi, pembicaraan tidak resmi, saling menyampaikan cara pandang, *lobby*, kunjungan dan aktivitas – aktivitas lainnya yang terkait. Penulis jurnal ini mengambil konsep dari Joseph Montville dengan memperkenalkan konsep “*track two*” *diplomacy* Konsep tersebut merujuk pada upaya-upaya yang dilakukan oleh aktor di luar pemerintah untuk meredam potensi konflik atau upaya-upaya resolusi atas konflik yang telah terjadi. Montville merasa perlu untuk memberikan label yang berbeda atasaksi yang dilakukan antar pemerintah dan label bagi upaya yang dilakukan oleh masyarakat atau warganegara sebagai aktor baru di luar pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk

menunjukkan bahwa peran warga dalam hubungan luar negeri diperlukan sebagai saluran untuk menangani permasalahan yang belum terjangkau pemerintah. Peran warga tersebut bisa bersifat mutlak namun juga bisa terlaksana karena fasilitasi dari pihak lain seperti pemerintah atau pihak sponsor lainnya. Peran warga ini tidak berjalan sendiri sebab masih dalam pengawasan dan pendampingan dari pemerintah sehingga pemenuhan kepentingan nasional dapat berjalan beriringan.

2.2 Kerangka Teoritis/Konseptual

Untuk membantu penulis di dalam melakukan penelitian, di dalam kerangka teoritis ini penulis akan memaparkan teori-teori yang mempunyai relevansi dengan masalah yang akan di bahas karena akan menjadi sumber dan landasan bagi penulis untuk membantu menganalisis masalah yang akan diteliti.

2.2.1 Hubungan internasional

Hubungan internasional adalah studi tentang hubungan dan interaksi antar negara. Hubungan internasional ini mengalami berbagai perkembangan dari yang hanya lebih memfokuskan terhadap masalah peperangan dan perdamaian seperti yang di katakan oleh Hans J. Morgenthau, *International relations is a struggle for power among nations* (hubungan internasional merupakan perjuangan untuk kekuasaan di antara bangsa-bangsa). Selanjutnya hubungan internasional ini bertransformasi dengan mulai merambah ke isu kerjasama antar negara baik di dalam kerjasama ekonomi maupun kerjasama dalam penyelesaian konflik agar terpenuhi kepentingan nasional negara tersebut. Perkembangannya pun tidak hanya terjadi pada pandangan terhadap masalah yang akan di hadapi namun juga terhadap aktor di dalam hubungan internasional itu sendiri yang tadinya selalu

beorientasi terhadap negara (*state centric*) sekarang telah bertransformasi dengan mulai memperhitungkan aktor non negara di dalam aktivitas hubungan internasional saat ini. Maka dari itu hubungan Internasional dapat didefinisikan sebagai studi hubungan dan interaksi antara Negara-negara, termasuk aktivitas dan kebijakan pemerintah, organisasi internasional, organisasi non pemerintah, dan perusahaan multinasional (Jackson & Sorensen, 2013).

Perubahan atau transformasi dari ilmu hubungan internasional ini tidak terlepas dari adanya globalisasi. Globalisasi tersebut telah menjadikan aktor-aktor non-negara menjadi semakin dominan, sedangkan peran dari aktor negara bangsa menjadi berkurang. Globalisasi pula telah membuat hubungan internasional yang tadinya ada sekat-sekat kedaulatan dan kebangsaan, menjadi masyarakat global yang warganya saling terhubung satu sama lain (Bakry, 2017).

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat di simpulkan bahwa hubungan internasional kontemporer sangat terpengaruhi oleh globalisasi dan hal itu berdampak dengan timbulnya rasa ketergantungan antar negara sehingga membuat para negara melakukan sebuah kerjasama baik bilateral maupun multilateral untuk bisa memenuhi kepentingan nasional negara tersebut dan menjadikan hubungan antar negara ini menjadi tidak ada batasnya. Fenomena globalisasi juga berdampak pada aktivitas di dalam hubungan internasional itu sendiri dengan memunculkan para aktor baru seperti aktor sub-negara dan aktor non-negara.

2.2.2 Politik Luar Negeri

Politik luar negeri merupakan sebuah instrumen negara di dalam melakukan aktivitas hubungan internasional. Kepentingan nasional dapat dikatakan sebagai konsep kunci dalam politik luar negeri. Menurut Coulombis dan Wolfe, politik luar negeri merupakan sintesis dari tujuan atau kepentingan nasional dengan power dan kapabilitas. Keadaan geografis maupun ekonomi suatu negara dapat memainkan peranan penting dalam penentuan politik luar negeri negara tersebut. Politik luar negeri suatu negara merupakan iringan kebijaksanaan disertai rentetan tindakan yang rumit tetapi dinamis, yang ditempuh oleh negara itu dalam hubungannya dengan negara-negara lain atau sebagai kegiatannya dalam organisasi-organisasi regional dan internasional (Suffri, 1989).

Politik luar negeri menurut Thomas Diez, yang secara tradisional didefinisikan sebagai kebijakan dari suatu negara yang diarahkan ke aktor-aktor eksternal dan khususnya negara lain. Sementara Ernest Petric dengan sederhana mendefinisikan politik luar negeri adalah aktivitas suatu negara untuk memenuhi tujuan-tujuan dan kepentingan-kepentingannya di dalam arena internasional. Lebih lanjut Bruce Russett dan Harvey Starr, menjelaskan bahwa istilah *policy* secara umum diyakini sebagai pedoman untuk sebuah tindakan atau seperangkat tindakan yang dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan dari sebuah organisasi yang telah ditetapkannya, yang melibatkan pilihan atau tindakan memilih (atau membuat keputusan) untuk mencapai tujuan tersebut. Dan adapun kata *foreign* menyiratkan unit-unit yang secara territorial berdaulat yang berada di luar batas-batas legal dari negara tertentu. Artinya apapun yang berada di luar batas territorial yang legal, atau tidak di bawah otoritas negara legal bersangkutan,

adalah *foreign*. Berdasarkan penjelasan tersebut politik luar negeri menurut Russett dan Starr adalah politik luar negeri dapat dianggap sebagai seperangkat pedoman untuk menentukan pilihan mengenai orang, tempat, atau hal-hal yang ada di luar batas-batas negara yang bersangkutan (Bakry, 2017). Berdasarkan pemaparan tentang politik luar negeri di atas dapat dikatakan bahwa politik luar negeri ini merupakan hal yang sangat penting di dalam hubungan bernegara dimana hal tersebut menjadi sebuah alat dan menghasilkan sebuah kebijakan yang akan diterapkan maupun digunakan di dalam hubungan antar negara maupun dengan organisasi-organisasi internasional.

2.2.3 Diplomasi

Diplomasi merupakan salah satu instrument penting dalam pelaksanaan politik luar negeri sebuah negara, diplomasi menjadi alat utama untuk mencapai sebuah kepentingan nasional yang berkaitan antar negara maupun organisasi internasional. Melalui diplomasi inilah sebuah negara dapat membangun citra tentang dirinya dalam rangka membangun nilai tawar suatu negara tersebut atau *state branding* (Shoelhi, 2011), dalam hubungan antar negara. Pada umumnya diplomasi dilakukan sejak tingkat paling awal sebuah negara hendak melakukan hubungan bilateral dengan negara lain hingga keduanya mengembangkan hubungan selanjutnya. Diplomasi banyak di definisikan menurut kamus hubungan internasional ialah serangkaian kebijakan yang dijalankan oleh suatu negara untuk mengamankan kepentingan dalam berhubungan dengan negara lain melalui proses tawar-menawar, negoisasi, tindakan non-coercive, dan penggalangan dukungan publik (Ashari, 2015). Sementara oxford dictionary mengartikan diplomasi sebagai manajemen hubungan internasional melalui

negosiasi. Diplomasi pada dasarnya lebih fokus terhadap hal yang berkaitan dengan pengelolaan hubungan antara negara dengan negara dan aktor lainnya, dengan hal yang berkaitan tentang kegiatan menuju perdamaian (Barston, 2013).

Banyak ahli di bidang diplomasi memberikan sebuah arti beragam untuk kata diplomasi itu sendiri. Sir Ernest Satow di dalam bukunya yang berjudul *Guide to Diplomatic practices* menunjukkan sejumlah definisi diplomasi sebagai berikut (Shoelhi, 2011):

1. Diplomasi adalah istilah yang dipergunakan sejak dulu bagi sebuah cabang ataupun disiplin ilmu mengenai hubungan luar negeri berdasarkan yang tertera dalam diploma (dokumen-dokumen) tertulis dari raja (Flassan).
2. Diplomasi adalah ilmu mengenai hubungan luar negeri atau masalah-masalah antar negara, dan lebih merupakan ilmu atau seni berunding (De Martens).
3. Diplomasi adalah ilmu mengenai hubungan-hubungan serta kepentingan-kepentingan dari negara-negara atau seni untuk mendamaikan/mempertemukan perbedaan-perbedaan gagasan antarbangsa, dan secara lebih khusus lagi, diplomasi adalah seni berunding (Garden).
4. Diplomasi adalah pemanfaatan seluruh pengetahuan dan prinsip-prinsip yang diperlukan untuk melaksanakan serta mengelola aneka urusan resmi antarnegara (de Cussy).
5. Diplomasi merupakan ilmu mengenai aneka hubungan antara berbagai negara yang tercipta sebagai hasil timbal balik kepentingan-kepentingan, dari prinsip-prinsip hukum antar negara dan ketentuan-ketentuan yang

dicantumkan dalam traktat-traktat ataupun persetujuan-persetujuan internasional (Calvo).

6. Diplomasi mencakup seluruh sistem kepentingan yang tercipta dari hubungan-hubungan antar negara; tujuannya adalah menjamin keamanannya, keharmonisannya, memelihara martabat serta kehormatannya dan tujuan langsungnya adalah memelihara perdamaian serta keharmonisan yang lestari antara beberapa kekuasaan (Garden).
7. Diplomasi lebih banyak merujuk pada seni berunding untuk mencapai persetujuan mengenai berbagai kepentingan antar bangsa daripada keterampilan mengarsipkan dokumen negara.

Berdasarkan pemaparan definisi diatas Sir Ernest satow menjelaskan lebih lanjut tentang diplomasi, yaitu:

“Diplomacy is application of intelligence and tact to conduct official relations between the governments of independent states, extending sometimes also to their relations with vassal states; or more briefly still, the conduct of business between states peaceful means”.

Rivier seseorang yang berlatarbelakang sebagai diplomat merumuskan definisi dari diplomasi ialah sebagai campuran antara ilmu, seni dan profesi. Menurutnya, pengertian diplomasi mencakup tiga hal sebagai berikut:

1. Diplomasi adalah ilmu yang mengajarkan seluk-beluk perawatan dan pengembangan hubungan antar bangsa melalui para wakilnya yang menguasai teknik dan strategi berunding.
2. Diplomasi adalah seni mengekspresikan suatu konsep yang meliputi seluruh permasalahan hubungan antar bangsa untuk disampaikan oleh

wakil-wakil resmi negara termasuk kementerian luar negeri dan seluruh agen-agen politik kepada mitra dialog secara damai.

3. Diplomasi diartikan juga sebagai karier atau profesi seorang diplomat yang gigih dan pantang menyerah dalam melakukan perundingan untuk mencapai kemenangan atau kejayaan negara yang diwakilinya di atas nilai-nilai dan prinsip-prinsip kewenangan dan tanggung jawab jabatannya. (Shoelhi, 2011)

Lebih lanjut Harold Nicolson memberikan definisi diplomasi secara lebih terperinci yaitu:

“Diplomacy includes the management of international relations by means of negotiation; diplomacy represent a skill to address ideas in the conduct of international intercourse and negotiations; diplomacy is the method by which these relations among nations are adjusted and managed by ambassadors and envoys; diplomacy is business or art of the diplomats to persuade the other”. (Shoelhi, 2011)

Berdasarkan penjelasan di atas tentang diplomasi maka dapat disimpulkan bahwa diplomasi adalah perpaduan antara ilmu dan seni perundingan atau metode untuk menyampaikan pesan melalui perundingan tersebut yang bertujuan untuk mencapai kepentingan nasional negara tersebut. Diplomasi yang biasanya hanya dilakukan secara resmi oleh antarpemerintah negara, pada masa sekarang telah mengalami perubahan pula menjadikan aktor non negara pun dapat berdiplomasi seperti antar lembaga, antar penduduk, ataupun antar komunitas dari negara yang berbeda. Oleh karenanya diplomasi tidak harus dilakukan secara resmi oleh aktor dari negara tetapi dari aktor non negara ataupun *privat persons* sehingga ketika terjadi jalan buntu ketika melakukan perundingan oleh aktor negara maka bisa dilakukan oleh *privat persons* biasanya hal tersebut bertujuan untuk membangun

sebuah *people to people connected*. Hal itu dikarenakan arus globalisasi yang sudah tidak dapat di bendung lagi, sehingga hadirnya aktor-aktor baru yang mewarnai kegiatan diplomasi di dunia internasional.

2.2.4 Paradiplomasi

Globalisasi sangat berpengaruh terhadap aktivitas diplomasi di dunia internasional, sehingga terciptanya aktor-aktor baru seperti aktor non-negara dan aktor sub-negara yang membuat peluang interaksi lebih meluas antar aktor di dunia internasional. Interaksi atau aktivitas yang dilakukan aktor sub-negara di dalam hubungan internasional biasa dikenal dengan istilah paradiplomasi. Istilah Paradiplomasi pertama kali dikenalkan dalam perdebatan akademik oleh ilmuwan asal Basque, Panayotis Soldatos tahun 1980-an sebagai penggabungan istilah *parallel diplomacy* menjadi *paradiplomacy*, yang mengacu pada makna *the foreign policy of non-central governments*.

Paradiplomasi merupakan istilah untuk menandai fenomena baru keterlibatan subnasional di hubungan internasional. Paradiplomasi umumnya disebut sebagai keterlibatan unit konstituen (wilayah) negara nasional dalam urusan internasional. Beberapa ahli melihat paradiplomasi dalam kaitannya dengan diplomasi dan mendefinisikannya sebagai kegiatan internasional langsung oleh aktor subnasional mendukung, melengkapi, memperbaiki, menduplikasi, atau menantang diplomasi negara-bangsa. Menurut Takdir Ali Mukti Paradiplomasi mengacu pada perilaku dan kapasitas melakukan hubungan luar negeri dengan pihak asing yang dilakukan oleh entitas '*sub-state*', dalam rangka kepentingan mereka secara spesifik (Mukti, 2013).

Stefan Wolff di dalam jurnalnya yang berjudul *Paradiplomacy: Scope, Opportunities and Challenges* menjelaskan bahwa paradiplomasi merupakan sebuah fenomena dan subjek baru di dalam ilmu hubungan internasional, dan mengacu pada kapasitas kebijakan luar negeri yang dilakukan aktor sub-negara dimana partisipasinya, terlepas dari aktor negara, dan dalam arena internasional ditunjukkan untuk mengejar kepentingan mereka sendiri, bukan untuk mendapatkan kepentingan nasional.

Seorang sejarawan hubungan internasional, Rohan Butler mendefinisikan paradiplomasi sebagai

“The highest level of personal and parallel diplomacy, complementing or competing with the regular foreign policy of the minister concerned, is thus a recurrent temptation to the chief of the executive, be he a premier or president, dictator or monarch”.
(Kuznetsov, n.d.)

Rohan Butler mengidentifikasi bahwa paradiplomasi hanya sebagai semacam negosiasi tidak resmi atau rahasia yang mungkin terjadi dalam bayangan diplomasi resmi.

Alexander S. Kuznetsov di dalam bukunya yang berjudul *Theory and Practice of Paradiplomacy: Subnational governments in international affairs* mendefinisikan paradiplomasi sebagai bentuk komunikasi politik untuk mencapai manfaat ekonomi, budaya, politik, atau jenis lainnya, yang intinya terdiri dari tindakan mandiri pemerintah daerah dengan aktor pemerintah dan non-pemerintah asing.

Ivo D. Duchacek mengklasifikasikan paradiplomasi kedalam empat tipe, yaitu *transborder paradiplomacy*, *transregional paradiplomacy*, *global*

paradiplomacy, dan *protodiplomacy* (Kuznetsov, n.d.). Jika melihat klasifikasi yang dibuat oleh Ivo D. Duchacek maka hubungan kerjasama paradiplomasi kota Bandung dan kota Braunschweig berada dalam tipe *global paradiplomacy* yang berarti paradiplomasi yang dilakukan oleh pemerintah sub-nasional di suatu negara dengan pemerintah sub nasional di negara lain, baik kedua wilayah sub nasional maupun kedua wilayah negara tersebut tidak berbatasan.

Sementara Rodrigo Tavares di dalam bukunya dia tidak mengajukan sebuah konsep melainkan sebagai *multilayered term* yang memiliki empat fenomena; ceremonial paradiplomacy; Single-themed paradiplomacy; global paradiplomacy, and sovereignty paradiplomacy (Tavares, 2016).

Panayotis Soldatos dalam *An Explanatory Framework for the Study of Federated States as Foreign-policy Actors* dalam *Federalism and International Relations; The Role of Sub-national Units*, Hans Michelmann, menjelaskan faktor-faktor pendorong paradiplomasi yang meliputi:

1. Dorongan dan upaya-upaya segmentasi baik atas dasar objektif (*objective segmentation*) antara lain didasari perbedaan geografi, budaya, bahasa, agama, politik dan faktor-faktor lain yang secara objektif berbeda dengan wilayah lain di negara tempat unit sub-nasional tersebut berada, maupun atas dasar persepsi (*perceptual segmentation* atau *electoralism*) yang meskipun terkait dengan *objective segmentation* namun lebih banyak didorong oleh faktor-faktor politik.

2. Adanya ketidakseimbangan dan keterwakilan unit-unit sub-nasional serta pada unit nasional dalam hubungan luar negeri (*asymmetry of federated/sub national units*).
3. Perkembangan ekonomi dan institusional yang alamiah pada unit-sub nasional mampu mendorong pemerintah sub nasional untuk mengembangkan perannya.
4. Kegiatan paradiplomasi juga bisa dilatarbelakangi oleh gejala internasional yang secara mudah dapat diartikan mengikuti hal-hal yang dilakukan unit sub-nasional lainnya.
5. Adanya kesenjangan institusional dalam perumusan kebijakan hubungan luar negeri dan inefisiensi pelaksanaan hubungan luar negeri pada pemerintahan nasional.
6. Masalah-masalah yang terkait dengan *nation-building* dan konstitusional (*constitutional uncertainties*) juga dapat mendorong pemerintah sub-nasional melakukan paradiplomasi.
7. Domestikasi politik luar negeri sebagai dampak dari mengemukakan isu-isu politik tingkat rendah telah memotivasi pemerintah sub nasional yang mempunyai kepentingan (*vested systemic interest*) dan kompetensi konstitusional untuk melakukan paradiplomasi (Michelman & Soldatos, 2006).

Paradiplomasi yang dilakukan oleh pemerintah sub-negara memiliki fokus yang berbeda, karena tidak semua pemerintah daerah melakukan aktivitas hubungan internasional dengan cara yang sama karena mereka memiliki cara

tersendiri dalam memenuhi kepentingannya. Berikut contoh kegiatan paradiplomasi yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah:

1. Pembentukan *sister city*
2. FDI (*foreign direct investment*)
3. Pembentukan proyek bersama
4. Pengiriman delegasi

Berdasarkan aktivitas paradiplomasi tersebut, Andre Lecours di dalam tulisannya *Political Issues of Paradiplomacy: Lessons From The Developed World* dia memperkenalkan sebuah konsep *layers of paradiplomacy* yang membagi menjadi tiga lapisan paradiplomasi yang dapat kita gunakan untuk membedakan paradiplomasi satu dengan yang lain.

Andre Lecours mengatakan bahwa lapisan paradiplomasi yang pertama adalah hubungan dan kerja sama pemerintah regional atau '*sub-states*' yang hanya berorientasi untuk tujuan-tujuan ekonomi semata seperti perluasan pasar, pengembangan investasi ke luar negeri, dan investasi secara timbal balik. Hubungan ini sama sekali tidak melibatkan motif motif yang kompleks, misalnya politik atau budaya.

Lapisan kedua lebih luas dan lebih multidimensi karena tidak hanya terfokus pada keuntungan ekonomi namun paradiplomasi yang melibatkan berbagai bidang dalam kerja sama atau '*multipurposes*', antara ekonomi, kebudayaan, pendidikan, kesehatan dan alih teknologi, dan sebagainya. Konsep hubungan ini mengacu pada model kerja sama luar negeri yang terdesentralisasi atau '*decentralized cooperation*'.

Lapisan ketiga paradiplomasi melibatkan pertimbangan politik. paradiplomasi kompleks yang melibatkan motif-motif politik dan identitas nasionalis wilayah yang spesifik. Mereka berusaha menjalin hubungan Interaksi Transnasional dan Paradiplomasi internasional dengan semangat yang sangat besar untuk mengekspresikan identitas nasional wilayah mereka yang spesifik dan otonom yang berbeda dengan sebagian besar wilayah di negara mereka.

Ketiga lapisan tersebut bersifat kumulatif karena hampir semua paradigma di negara-negara maju memiliki komponen ekonomi. Kemudian banyak pemerintah daerah menambahkan elemen kerjasama dan mulai memasuki ke dalam lapisan kedua yaitu mulai membuat kerjasama yang lebih luas dan ada beberapa yang dipilih lebih politis atau masuk pada lapisan ketiga. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa paradiplomasi merupakan hal yang multifungsi. Daerah dapat memutuskan untuk pergi ke luar negeri untuk mendukung pembangunan ekonomi, tetapi mereka juga dapat menambahkan lapisan, yaitu, memasukkan keprihatinan lain, terkait dengan kepentingan dan / atau identitas. Untuk masyarakat berkembang, masuk akal untuk mendekati paradiplomasi dengan cara yang komprehensif dan untuk melampirkan banyak tujuan yang berbeda padanya.

Jika dilihat dengan ketiga kategori di atas, pelaksanaan hubungan kerja sama luar negeri oleh pemerintah daerah atau paradiplomasi di Indonesia, baik provinsi atau kabupaten/kota, dapat dikelompokkan ke dalam kategori kedua, di mana pemda dalam menjalin hubungan dan kerja sama dengan pihak asing hampir selalu menggunakan '*memorandum of understanding*' yang mencakup berbagai bidang yang kompleks, antara lain kerjasama ekonomi, pendidikan,

kebudayaan/kesenian, pertanian, kesehatan, alih teknologi, bantuan tenaga ahli, bantuan teknis, dan sebagainya. Maka dari itu kerjasama paradiplomasi kota Bandung-Braunschweig masuk ke dalam lapisan kedua karena hubungan kerjasama kota ini memiliki *memorandum of understanding*.

Diplomasi publik juga menjadi hal penting ataupun penunjang di dalam aktivitas paradiplomasi ini karena diplomasi publik memiliki tujuan untuk berusaha menggunakan pengaruh dari sikap publik pada perumusan dan pelaksanaan politik luar negeri suatu negara, dengan melakukan strategi dengan merekayasa opini publik di negara lain, menjalin interaksi dengan kelompok-kelompok swasta dan berbagai kelompok kepentingan lainnya, dan melancarkan arus pertukaran gagasan dan informasi antar negara, merupakan cara-cara yang sangat populer dan efektif. Secara sederhana diplomasi publik bertujuan untuk mencari teman di kalangan masyarakat negara lain, yang dapat memberikan kontribusi bagi upaya membangun hubungan baik dengan negara lain.

Diplomasi publik bukan berarti menggantikan, tetapi melengkapi upaya-upaya pemerintah di dalam melakukan diplomasi tradisional. Akan tetapi diplomasi publik ini menjadi pembuka jalan bagi negosiasi yang dilakukan antar pemerintah, memberi masukan melalui informasi-informasi penting dan memberikan visi yang berbeda terhadap suatu masalah. Peran masyarakat di dalam diplomasi publik memiliki peranan yang sangat besar karena dapat menjadi pemecah kebuntuan di dalam negosiasi yang terlalu kaku di lakukan oleh pemerintah maka peran masyarakat dapat terlihat dengan melakukan upaya-upaya yang lebih informal kemudian mereka berinteraksi dan mulai membangun upaya dalam mempengaruhi sebuah kebijakan dan tentunya di dalam konteks

paradiplomasi. Keterlibatan publik tidak dapat di acuhkan di dalam konteks paradiplomasi karena banyak kegiatan-kegiatan paradiplomasi yang berjalan tidak lepas dari publik yang menjadi pemilik peran yang besar didalam mendorong aktivitas paradiplomasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Dikarenakan banyaknya aktor yang terlibat di dalam aktivitas paradiplomasi maka tidak lepas dari konsep *multy-track diplomacy*. *Multi-Track Diplomacy* merupakan perkembangan lebih lanjut dari second track diplomasi atau diplomasi publik adalah dengan munculnya konsep *multy-track diplomacy* dengan mengusung *spirit peace building through collaboration* oleh DR. Louise Diamond dan Ambassador John McDonald, Amerika Serikat. Mereka mendefinisikan *multy-track diplomacy* sebagai berikut:

“Diplomasi multi jalur merupakan sebuah cara konseptual untuk melihat proses penciptaan perdamaian dunia sebagai sebuah sistem yang hidup. Ia memandang beragam aktivitas yang saling berinterkoneksi, individu-individu, institusi, dan komunitas yang bekerja bersama-sama untuk sebuah tujuan yang sama, yakni terciptanya dunia yang damai”.

Multi-track diplomacy merupakan perluasan atas diplomasi *track one* dan *track two* yang kemudian bertambah sampai track nine. Setiap *track* memiliki sumber daya, nilai nilai dan pendekatannya sendiri, namun ketika mereka ada dalam struktur lingkaran itu, elemen-elemen tersebut dapat bekerja dengan lebih kuat efeknya. Setiap *track* beroperasi secara bersama-sama sebagai sebuah sistem. Menurut DR. Louise Diamond dan John McDonald ada sembilan track dalam *multi-track diplomacy* itu adalah sebagai berikut:

1. *Track one* atau pemerintah, atau juru damai melalui diplomasi, Departemen Luar Negeri, para pejabat pemerintah, dan anggota parlemen menjadi aktor utama dalam diplomasi dan negosiasi jenis ini. Sebagai pembuat kebijakan, mereka membuka jalan bagi upaya-upaya perdamaian.
2. *Track two* yaitu *non-government* atau orang yang profesional, mampu mewujudkan perdamaian melalui resolusi konflik. Ini menjadi kesempatan bagi para profesional non-governmental untuk menganalisa, mencegah, menyelesaikan, serta mengakomodasi konflik internasional dengan komunikasi, pemahaman, dan membangun hubungan baik dalam menghadapi masalah secara bersama-sama, oleh aktor-aktor bukan negara.
3. *Track three* yaitu bisnis, atau penciptaan perdamaian melalui perdagangan. Ini merupakan wilayah bisnis yang senyata nya, yang sangat potensial untuk mempengaruhi penciptaan perdamaian melalui pemanfaatan peluang-peluang ekonomi, persahabatan dan pemahaman internasional, saluran-saluran komunikasi informal, dan dukungan dari kegiatan-kegiatan *peacemaking* lainnya.
4. *Track four* yaitu warga negara biasa/swasta, atau penciptaan perdamaian melalui keterlibatan personal/individual. Ini termasuk berbagai macam cara yang digunakan individu untuk terlibat dalam aktivitas perdamaian dan pembangunan, melalui program pertukaran, organisasi sukarela, organisasi non-pemerintah, atau kelompok kepentingan khusus yang *concern* pada perdamaian.
5. *Track five* yaitu penelitian, pelatihan dan pendidikan, atau penciptaan perdamaian melalui pembelajaran. Termasuk dalam aktivitas ini adalah

kerja sama antar universitas, kerja sama pakar, pusat research khusus, program beasiswa dari Taman Kanak-Kanak sampai dengan Ph.D, kerja sama program studi atau penelitian tentang *multicultural, cross culture*, dan studi perdamaian, dan beragam aktivitas pembelajaran lainnya.

6. *Track six* yaitu kalangan aktifis, atau penciptaan perdamaian melalui advokasi (publik). Aktivitas ini adalah pekerjaan yang dilakukan para aktivis dari berbagai bidang, antara lain aktivis HAM, lingkungan hidup, keadilan ekonomi, aktivis perlucutan senjata (nuklir, misalnya), dan advokasi terhadap kelompok tertentu yang terkalahkan karena kebijakan pemerintah yang kurang adil, misalnya.
7. *Track seven* yaitu agama, atau penciptaan perdamaian melalui keyakinan dalam aksi nyata. Ini merupakan pelaksanaan dari keyakinan dan aktivitas yang berorientasi perdamaian dari komunitas-komunitas spiritual atau agama, dan sepenuhnya adalah *morally based movement* atau gerakan moral.
8. *Track eight* yaitu pendanaan, atau penciptaan perdamaian melalui pemberian sumberdaya. Ini mengacu pada komunitas atau individu yang memiliki kemampuan sumber daya untuk melakukan amal dengan men-support aktivitas di *track-track* yang lainnya.
9. *Track nine* yaitu komunikasi dan media massa, atau penciptaan perdamaian melalui informasi. Ini adalah realitas dari aspirasi masyarakat; bagaimana opini publik dieskpresikan oleh media publik, film, media cetak, TV, radio, sistem elektronik dan seni secara umum (Mukti, 2013).

2.2.5 Kerjasama Internasional

Kerjasama internasional pada era sekarang sudah tidak dapat diabaikan oleh para aktor hubungan internasional, dikarenakan adanya saling ketergantungan para negara untuk memenuhi kepentingan nasionalnya. Kerjasama internasional merupakan sebuah perwujudan dari kondisi masyarakat yang saling tergantung satu dengan yang lainnya. Kerjasama internasional dapat terbentuk karena kehidupan internasional meliputi berbagai bidang seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial, lingkungan hidup, kebudayaan, pertahanan dan keamanan, hal tersebut memunculkan kepentingan yang beranekaragam sehingga mengakibatkan berbagai masalah sosial, untuk mencari solusi atas berbagai masalah tersebut maka beberapa negara membentuk suatu kerjasama internasional (Perwita & Yani, 2005). Kerjasama internasional adalah hubungan antar suatu negara dengan negara lainnya dalam bidang-bidang tertentu melalui kesepakatan-kesepakatan tertentu, dengan memegang prinsip keadilan dan saling menguntungkan.

Menurut K.J Holsti, kerjasama bermula karena adanya keanekaragaman masalah nasional, regional maupun global yang muncul sehingga diperlukan adanya perhatian lebih dari satu negara, kemudian masing-masing pemerintah saling melakukan pendekatan dengan membawa usul penanggulangan masalah, melakukan tawar-menawar, atau mendiskusikan masalah, menyimpulkan bukti-bukti teknis untuk membenarkan satu usul lainnya, dan mengakhiri perundingan dengan suatu perjanjian atau saling pengertian yang dapat memuaskan semua pihak (Holsti, 1995).

Pengertian dari kerjasama internasional itu sendiri menurut Koesnadi Kartasasmita adalah:

“Kerjasama dalam masyarakat internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat terdapatnya hubungan interdependensi dan bertambah kompleksnya kehidupan-kehidupan manusia dalam bermasyarakat internasional. Kerjasama internasional terjadi karena national understanding dimana mempunyai corak dan tujuan yang sama, keinginan yang didukung untuk kondisi internasional yang saling membutuhkan, kerjasama itu didasari oleh kepentingan yang saling membutuhkan, kerjasama itu didasari oleh kepentingan bersama di antara negara- negara, namun kepentingan itu tidak identik” (Kartasasmita, 1983).

Definisi kerjasama menurut K.J Holsti dapat dibagi menjadi 5, yaitu:

1. Pandangan bahwa dua atau lebih kepentingan nilai atau tujuan saling bertemu dan dapat menghasilkan sesuatu yang dipromosikan atau dipenuhi oleh semua pihak.
2. Persetujuan atas masalah tertentu antar dua negara atau lebih dalam rangka memanfaatkan persamaan benturan kepentingan.
3. Pandangan atau harapan suatu negara bahwa kebijakan yang diputuskan oleh negara lainnya membantu negara itu untuk mencapai kepentingan dan nilai-nilainya.
4. Aturan resmi atau tidak resmi mengenai transaksi di masa depan yang dilakukan untuk melaksanakan tujuan.
5. Transaksi antara negara untuk memenuhi persetujuan mereka (Holsti, 1995)

Dalam konteks kewenangan Pemerintah Daerah dalam menjalankan hubungan luar negeri, dalam bentuk kerjasama Paradiplomasi, para pelaksana

kerjasama ini yakni pemerintah sub-nasional menghadapi suatu kesamaan permasalahan yang dihadapi dan diharapkan dengan adanya hubungan kerjasama ini, dapat memberikan sumbangsih dalam bentuk penyelesaian masalah, dan tidak hanya itu saja, diharapkan dapat memperdalam terjalinnya hubungan kerjasama yang dapat menghasilkan suatu hasil yang jauh lebih bermanfaat.

Ada beberapa alasan mengapa negara melakukan kerjasama dengan negara lainnya:

1. Demi meningkatkan kesejahteraan ekonominya, dimana melalui kerjasama dengan negara lainnya, negara tersebut dapat mengurangi biaya yang harus ditanggung dalam memproduksi suatu produk kebutuhan bagi rakyatnya karena keterbatasan yang dimiliki negara tersebut.
2. Untuk meningkatkan efisiensi yang berkaitan dengan pengurangan biaya.
3. Karena adanya masalah-masalah yang mengancam keamanan bersama.
4. Dalam rangka mengurangi kerugian negatif yang diakibatkan oleh tindakan-tindakan individual negara yang memberi dampak terhadap negara lain. (Holsti, 1995)

Dikarenakan kerjasama paradiplomasi kota Bandung dengan kota Braunschweig merupakan kerjasama luar negeri yang di lakukan pemerintah daerah, maka penulis akan memaparkan konsep kerjasama luar negeri yang di

lakukan oleh pemerintah daerah. Di dalam buku panduan umum tata cara kerjasama luar negeri oleh pemerintah daerah (2012) diuraikan mekanisme umum hubungan dan kerjasama luar negeri oleh daerah, diantaranya:

1. Bidang-bidang Pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang terkait dengan hubungan dan kerjasama luar negeri, berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional wajib dikonsultasikan dan dikoordinasikan dengan Menteri.
2. Hubungan dan kerjasama luar negeri oleh Pemerintah Daerah harus diselenggarakan sesuai dengan Politik Luar Negeri. Sesuai Konvensi Wina Tahun 1961 mengenai Hubungan Diplomatik dan Konvensi Wina Tahun 1963 mengenai Hubungan Konsuler, di luar negeri hanya dikenal Perwakilan Republik Indonesia yang melayani kepentingan negara Republik Indonesia termasuk Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah tidak dibenarkan membuka perwakilan tersendiri.
3. Bidang-bidang hubungan dan kerjasama luar negeri oleh Daerah yang memerlukan konsultasi dan koordinasi dengan Departemen Luar Negeri antara lain sebagai berikut:
 - A. Kerjasama Ekonomi
 - a) Perdagangan
 - b) Investasi

- c) Ketenagakerjaan
- d) Kelautan dan Perikanan
- e) Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
- f) Kehutanan
- g) Pertanian
- h) Pertambangan
- i) Kependudukan
- j) Pariwisata
- k) Lingkungan Hidup
- l) Perhubungan

B. Kerjasama Sosial Budaya

- a) Pendidikan
- b) Kesehatan
- c) Kepemudaan
- d) Kewanitaan
- e) Olahraga
- f) Kesenian

C. Bentuk Kerjasama Lain

4. Departemen Luar Negeri sebagai Koordinator penyelenggaraan Hubungan dan Keerjasama Luar Negeri memberikan saran dan pertimbangan politis/yuridis terhadap program kerjasama yang dilaksanakan oleh Daerah dengan Badan/ Lembaga di luar negeri. Sedangkan departemen teknis memberikan saran dan pertimbangan mengenai materi/ substansi program kerjasama.

5. Kerjasama luar negeri dilakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Dengan negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia dan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);
- b) Sesuai dengan bidang kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan nasional Republik Indonesia;
- c) Mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);
- d) Tidak mengganggu stabilitas politik dan keamanan dalam negeri;
- e) Tidak mengarah pada campur tangan urusan dalam negeri masing-masing negara;
- f) Berdasarkan asas persamaan hak dan tidak saling memaksakan kehendak;
- g) Memperhatikan prinsip persamaan kedudukan, memberikan manfaat dan saling menguntungkan bagi Pemerintah daerah dan masyarakat;
- h) Mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan nasional dan Daerah serta pemberdayaan masyarakat.

6. Pelaksanaan kerjasama luar negeri harus aman dari berbagai segi yaitu:

- a) Politis: Tidak bertentangan dengan Politik Luar Negeri dan kebijakan Hubungan Luar Negeri Pemerintah Pusat pada umumnya.
 - b) Keamanan: Kerjasama luar negeri tidak digunakan atau disalahgunakan sebagai akses atau kedok bagi kegiatan asing (spionase) yang dapat mengganggu atau mengancam stabilitas dan keamanan dalam negeri.
 - c) Yuridis: Terdapat jaminan kepastian hukum yang secara maksimal dapat menutup celah-celah (loopholes) yang merugikan bagi pencapaian tujuan kerjasama.
 - d) Teknis: Tidak bertentangan dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Departemen Teknis yang terkait.
- (Indonesia, 2006)

2.2.6 Pendidikan

Pendidikan di Kota Bandung sama dengan daerah di seluruh wilayah di Indonesia, semua penduduk wajib mengikuti program wajib belajar pendidikan dasar selama sembilan tahun, enam tahun di sekolah dasar/ madrasah ibtidaiyah dan tiga tahun di sekolah menengah pertama/ madrasah tsanawiyah. Pendidikan di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan di Indonesia terbagi ke dalam tiga jalur utama, yaitu formal, nonformal, dan informal. Pendidikan juga dibagi ke dalam empat jenjang, yaitu anak usia dini, dasar,

menengah, dan tinggi. Pendidikan menengah yang terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan di jelaskan dalam konsep pendidikan di Indonesia.

Pendidikan merupakan instrument yang sangat penting untuk membangun SDM yang berkualitas, dengan suksesnya sistem pendidikan maka akan terbentuk generasi yang berkualitas pada masa yang akan datang. Oleh karena itu kota Bandung banyak melakukan sebuah kerjasama di dalam bidang pendidikan baik kerjasama di dalam negeri maupun luar negeri salah satunya adalah kerjasama yang di lakukan kota Bandung dengan kota Braunschweigh yang berada di Jerman dengan harapan agar dapat membantu peningkatan kualitas pendidikan di kota Bandung dengan cara pertukaran pelajar untuk membentuk karakter pelajar kota Bandung agar dapat berkualitas dan juga kerjasasama antar lembaga pendidikan agar dapat meningkatkan kualitas sistem pendidikan di kota Bandung sendiri. Ki Hajar Dewantara yang merupakan tokoh di dalam dunia pendidikan di Indonesia mengemukakan konsep pendidikan nasional yaitu *tutwuri handayani*. Ki Hajar Dewantara mendefinisikan pendidikan merupakan proses pembudayaan yakni suatu usaha memberikan nilai-nilai luhur kepada generasi baru dalam masyarakat yang tidak hanya bersifat pemeliharaan tetapi juga dengan maksud memajukan serta memperkembangkan kebudayaan menuju keluhuran hidup kemanusiaan.

Sementara menurut Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pada pasal 1 menyebutkan bahwa :

“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan,

akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”.

Selanjutnya di dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional menjelaskan bahwa fungsi dan tujuan dari pendidikan nasional dituangkan di dalam pasal 3 yang menyebutkan bahwa :

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.

2.2.7 Kepemudaan

Menurut Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009

Tentang Kepemudaan pada pasal 1 menyebutkan bahwa:

“Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda”.

Selanjutnya di dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan pada bab 2 pasal 3 menjelaskan tentang tujuan pembangunan kepemudaan yang menyebutkan bahwa:

“Pembangunan kepemudaan bertujuan untuk terwujudnya pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Kemudian dijelaskan pula tentang peranan pemuda yang di tuangkan pada Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan pada bab 5 di dalam pasal 16 yang menuangkan bahwa, pemuda berperan aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan nasional.

Berdasarkan pengertian di atas dapat di simpulkan bahwa Kepemudaan merupakan hal-hal yang berkaitan dengan pemuda. Kota Bandung sendiri pada tahun 2017 di anugerahi kota layak pemuda, jika melihat hal tersebut tidak aneh karena di kota Bandung sendiri memiliki berbagai komunitas, organisasi yang di dalam nya di huni oleh pemuda dan memberikan dampak positif terhadap pembangunan pemuda di kota Bandung sendiri. Kota Bandung pun memiliki berbagai kerjasama di dalam hal kepemudaan ini terutama dengan kota Braunschweig di kota Jerman sesuai dengan penelitian yang akan saya lakukan hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan pembangunan pemuda karena pemuda dapat melakukan beberapa peran di dalam sebuah pemerintahan seperti kontrol sosial.

2.3 Hipotesis Penelitian

Dengan adanya kerjasama paradiplomasi antara kota Bandung dengan kota Braunschweig melalui salah satu aktivitas paradiplomasi yaitu pembentukan kerjasama di bidang sister city yang mencakup berbagai bidang kerjasama diantaranya bidang pendidikan dan bidang kepemudaan, maka akan meningkatkan kualitas pendidikan dan kepemudaan di kota Bandung.

2.4 Verifikasi Variabel dan Indikatornya

Variabel dalam Hipotesis (Teoritik)	Indikator (Empirik)	Verifikasi (Analisis)
Variabel bebas: Dengan adanya kerjasama <i>Paradiplomacy</i> Kota Bandung - Braunschweigh di dalam bidang pendidikan dan kepemudaan.	1. Adanya aktivitas kerjasama paradiplomacy kota Bandung dengan kota Braunschweigh yaitu dengan pembentukan kerjasama sister city.	1. Ditandatanganinya <i>Memorandum of Understanding (MoU)</i> kerjasama Kota Bandung dengan Kota Braunschweigh pada tanggal 19 Juni 2000 yang berisikan berbagai kesepakatan untuk melakukan sebuah kerjasama di berbagai bidang dan didalamnya terdapat kerjasama dalam bidang pendidikan dan kepemudaan.
Variabel terikat: Maka akan meningkatnya kualitas pendidikan dan kepemudaan di kota Bandung	1. Adanya program kerjasama di dalam bidang pendidikan dan kepemudaan antara kota Bandung dengan kota	1. Di implementasikannya program di dalam bidang pendidikan dan kepemudaan seperti pertukaran pelajar dan pemuda serta di bangunnya gedung gelanggang generasi muda(GGM).(http://kerjasama.bandung.go.id/luar-negeri/sister-

	Braunschweig	city)
	<p>2. Kerjasama Universitas Nurtanio Bandung (Unnur) dengan HIWL (<i>Hochschule für Internationale Wirtschaft und Logistik</i>) dan <i>Tehnishe Universität Braunschweig</i></p>	<p>1. Ditandatanganinya <i>Memorandum of Understanding</i> (MoU) antara Unnur dan HIWL di bidang pendidikan Logistik yang terkait dengan Fakultas Teknik, Ekonomi dan Ilmu Sosial & Ilmu Politik Unnur.</p> <p>2. Ditandatangani MOM antara FT Unnur dengan TU Braunschweig untuk menjalin kerjasama di bidang pendidikan kedirgantaraan.</p> <p>(https://www.unnur.ac.id/kunjungan-unnur-ke-jerman/)</p>
	<p>3. Kerjasama Institut Teknologi Bandung dengan Braunschweig University of Art</p>	<p>1. Adanya kegiatan pelatihan dan pertukaran dosen di Fakultas seni rupa ITB (FSRD)</p> <p>2. Adanya kegiatan <i>student exchange</i> dan <i>lecture exchange</i></p>
	<p>4. Terbentuknya kepedulian pemuda di dalam</p>	<p>1. Adanya inisiatif dari komunitas Bahasa Jerman (Deutschclub) untuk mendorong dan membantu</p>

	<p>kerjasama antara kota Bandung dengan kota Braunschweig.</p>	<p>pemerintah dalam mempererat hubungan Bandung dan Braunschweig dengan cara melakukan peringatan kerjasama antar kedua kota dan juga melakukan kampanye untuk mempererat hubungan kerjasama antara kedua kota tersebut.</p> <p>2. Di bentuknya komunitas Bandung sister city youth forum oleh dinas pemuda dan olah raga kota Bandung dalam rangka meningkatkan kepedulian pemuda terhadap kerjasama luar negeri kota Bandung serta memperkuat hubungan <i>Sister Cities</i> yang ada di Bandung.</p>
--	--	--

2.5 Skema dan Alur Penelitian

“Kerjasama Paradiplomasi Antara Kota Bandung Dengan Kota Braunschweig
di Dalam Bidang Pendidikan Dan Bidang Kepemudaan”

